



LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PERIODE MEI 2023



Digital Signature
mk-1615345030230526011208



LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik diantaranya dapat dilakukan dengan meminimalkan terjadinya korupsi; pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan; serta pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan saat ini, korupsi menjadi fenomena yang masih melekat di instansi pemerintahan. Oleh karenanya, banyak upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat mulai dari ditetapkannya Peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi, pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sampai dengan diterbitkannya SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka setiap K/L/D diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh instansi pemerintah dapat diterapkan melalui Persepsi Anti Korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang akan menghasilkan nilai indeks persepsi anti korupsi. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada instansi tersebut.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tinggi negara juga wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi anti korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mencegah dan memberantas korupsi, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bertujuan untuk:

- a. Mengukur nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- b. Sebagai bahan pengambil kebijakan, untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Variabel Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi:

1. Diskriminasi pelayanan

Petugas memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

2. Kecurangan pelayanan

Petugas memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Petugas menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, kopi, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transportasi, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Pungutan liar

Petugas melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb)

5. Percaloan

Praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamda 3,841)

N = Populasi sebanyak 18

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 18 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Layanan

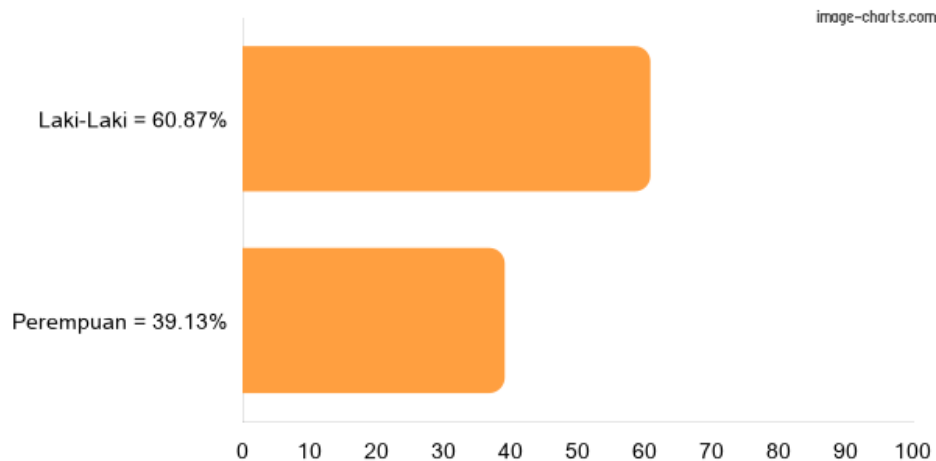
Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Pemeriksaan dan Pemberkasan Perkara (Penyiapan Bahan Putusan, Telaah Perkara, Berita Acara Sidang, Minutasi, Ikhtisar)	23	100%
	Total	23	100%

2. Profil Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

2.1. Jenis Kelamin



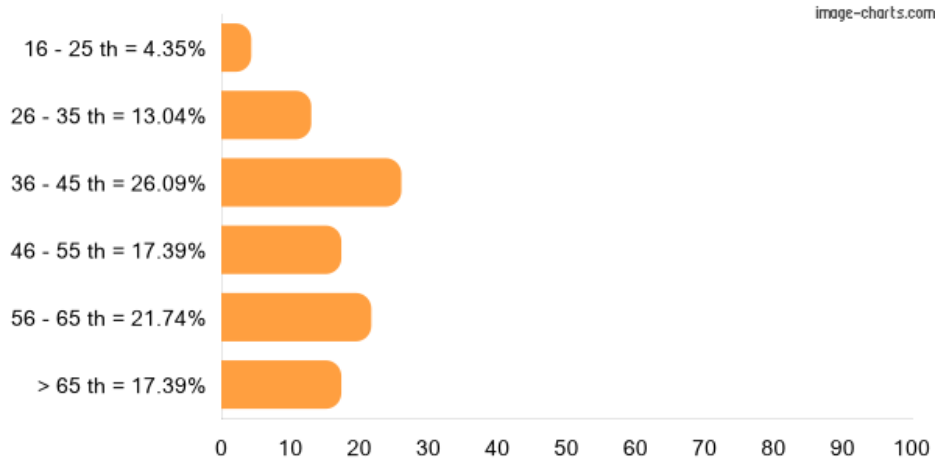
Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin





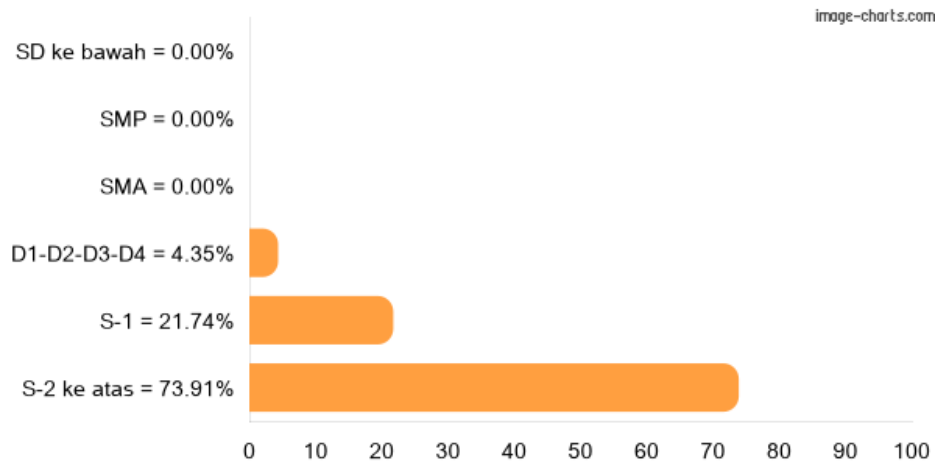
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

2.2. Umur



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur

2.3. Pendidikan Terakhir



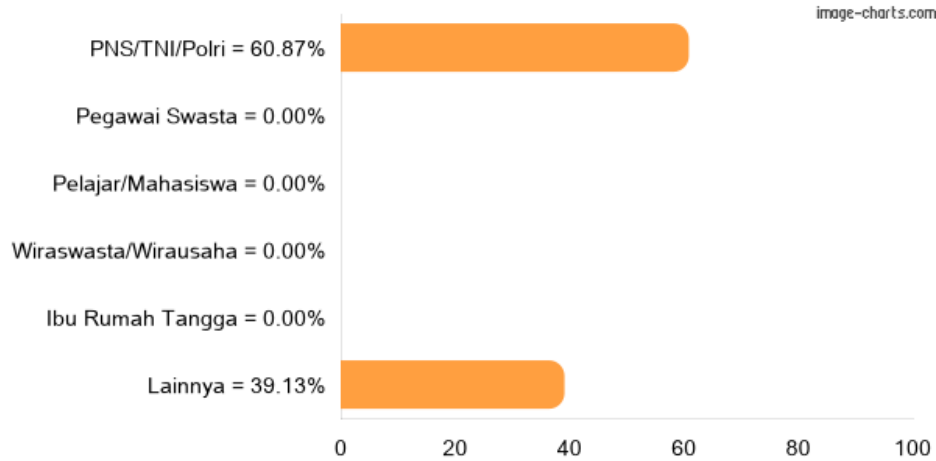
Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

2.4. Pekerjaan Utama



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Hakim Konstitusi
2	Ketua Mahkamah Konstitusi
3	Pejabat negara
4	Hakim Konstitusi
5	Hakim Konstitusi
6	Hakim Konstitusi RI
7	Hakim Konstitusi
8	Hakim Konstitusi
9	hakim Konstitusi





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

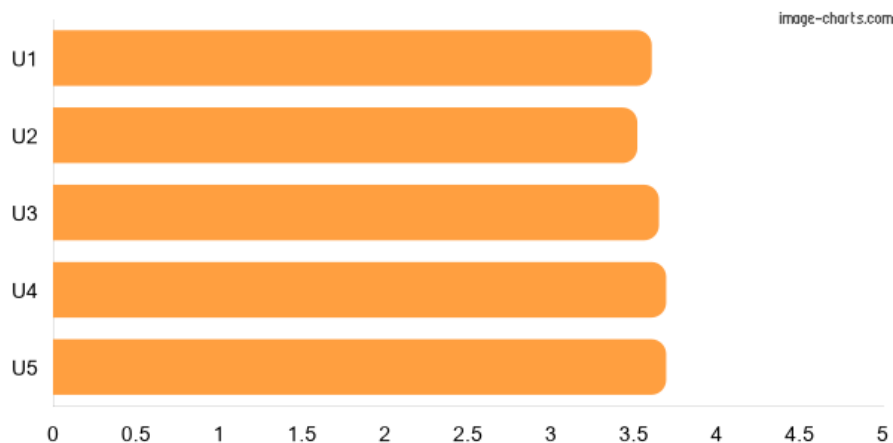
3. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Kepaniteraan mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3.635**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Diskriminasi pelayanan	3,609	Sangat Baik
2	U2. Kecurangan pelayanan	3,522	Baik
3	U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi	3,652	Sangat Baik
4	U4. Pungutan liar	3,696	Sangat Baik
5	U5. Percaloan	3,696	Sangat Baik
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		3,635	Sangat Baik
Nilai Konversi		90,87	Sangat Baik

Nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kepaniteraan apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Grafik Unsur Kepaniteraan



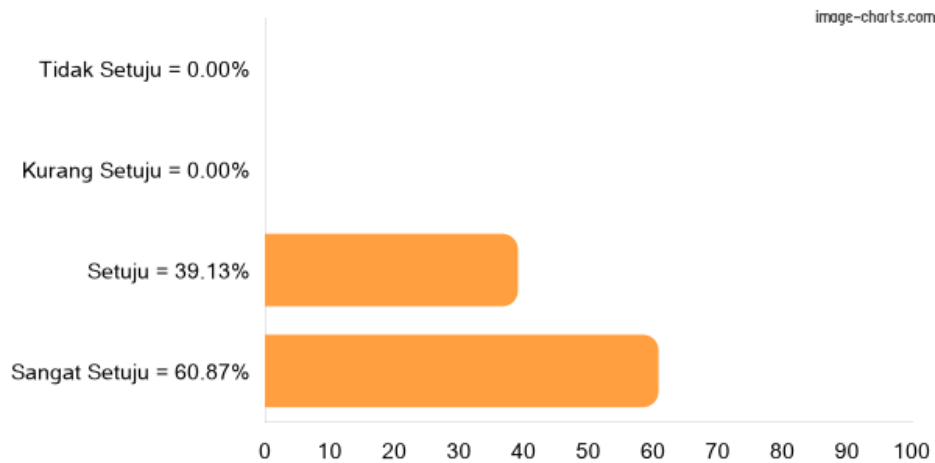


L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

4. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat anti korupsi pada Kepaniteraan. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:

4.1. U1. Diskriminasi pelayanan



Gambar 5. Grafik Unsur Diskriminasi pelayanan

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Diskriminasi pelayanan

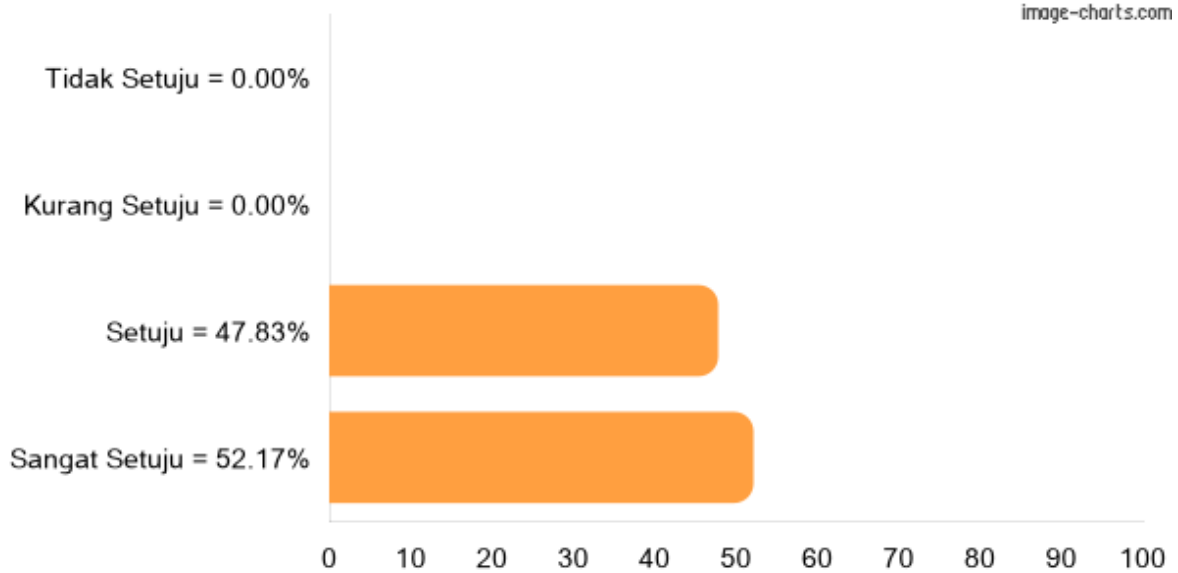
No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	9	39,13 %
4	Sangat Setuju	14	60,87 %
	TOTAL	23	100 %





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

4.2. U2. Kecurangan pelayanan



Gambar 6. Grafik Unsur Kecurangan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Kecurangan pelayanan

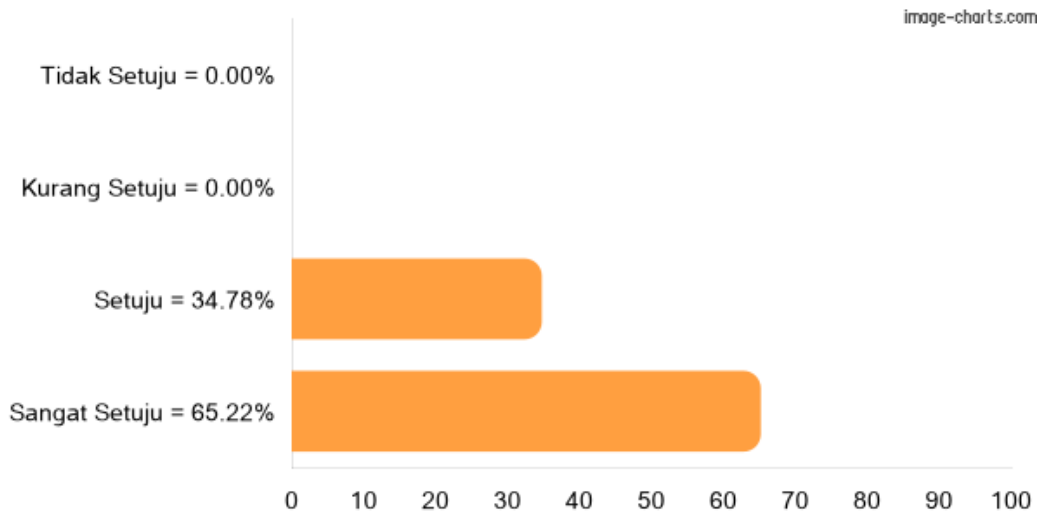
No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	11	47,83 %
4	Sangat Setuju	12	52,17 %
	TOTAL	23	100 %





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

4.3. U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi



Gambar 7. Grafik Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

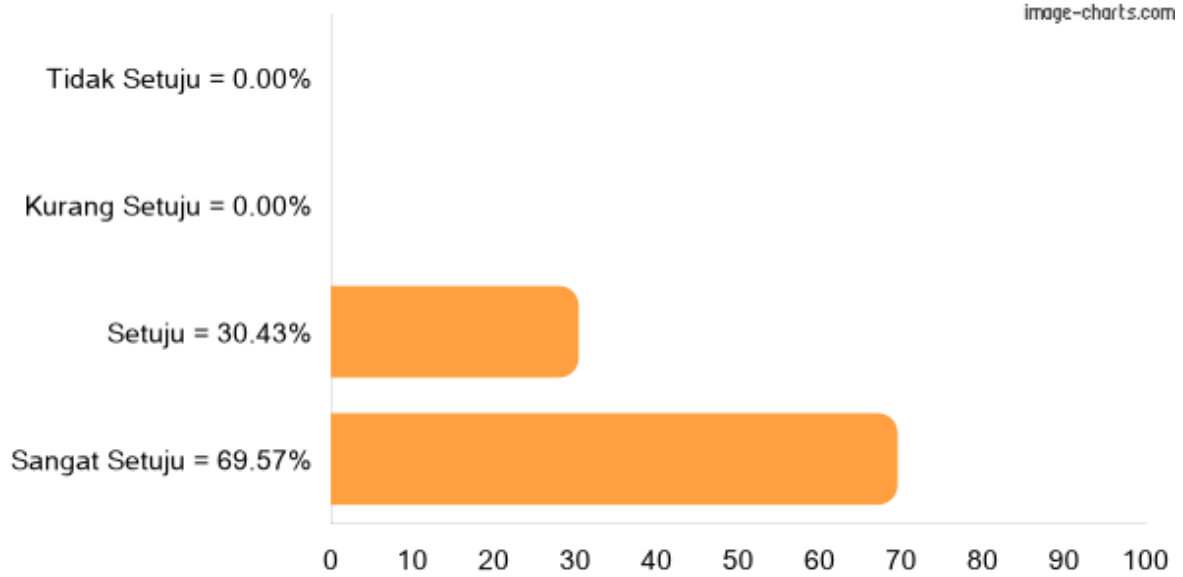
No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	8	34,78 %
4	Sangat Setuju	15	65,22 %
	TOTAL	23	100 %





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

4.4. U4. Pungutan liar



Gambar 8. Grafik Unsur Pungutan liar

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Pungutan liar

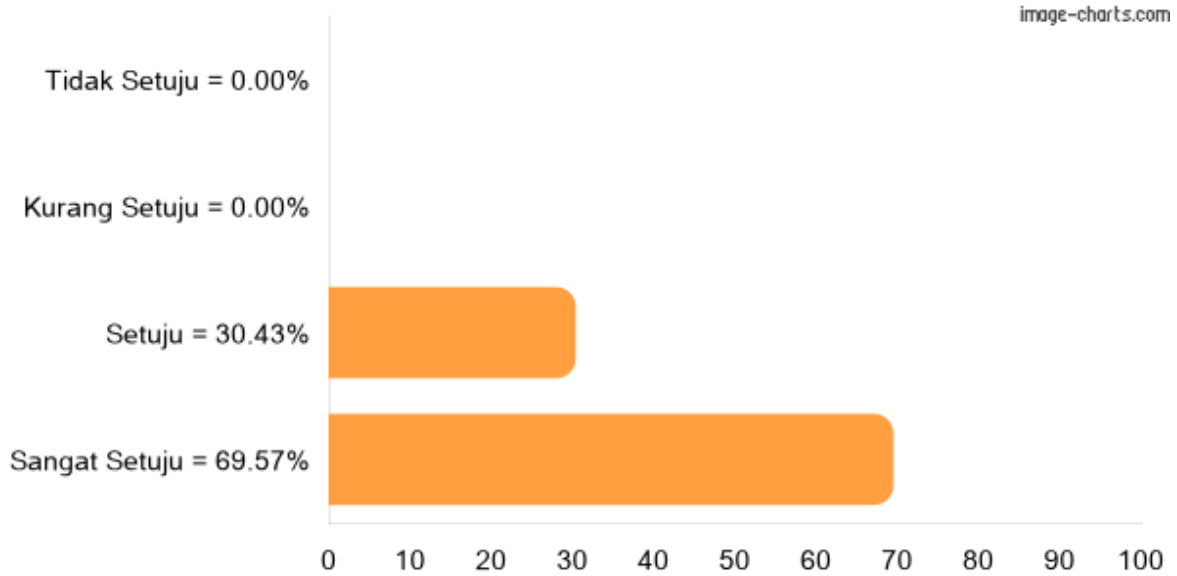
No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	7	30,43 %
4	Sangat Setuju	16	69,57 %
	TOTAL	23	100 %





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

4.5. U5. Percaloan



Gambar 9. Grafik Unsur Percaloan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Percaloan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	7	30,43 %
4	Sangat Setuju	16	69,57 %
	TOTAL	23	100 %





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

5. Saran Responden

Saran responden mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kepaniteraan sebagai berikut:

No	Saran
1	Bagus.
2	Sudah sangat sesuai
3	pertahankan dan tingkatkan kinerja lebih baik lagi
4	saran
5	Good job
6	Pertahankan dan tingkatkan layanan kepada masyarakat
7	pertahankan pelayanan yang sudah baik menjadi baik lagi dan lagi. terima kasih
8	Good job
9	Semoga pelayanan Kepaniteraan tetap baik dan lebih bisa ditingkatkan. Semangat untuk Kepaniteraan.
10	Pertahankan dan tingkatkan terus layanan di Kepaniteraan MK
11	kualitas pelayanan publik yang sudah sangat baik, terimakasih
12	Semoga pelayanannya lebih ditingkatkan.
13	Pertahankan dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala demi terciptanya budaya bebas korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
14	Pertahankan Terus untuk tidak menerima imbalan berupa uang terutama dalam pelayanan perkara
15	Kepaniteraan agar dapat berkoordinasi dalam penyusunan Jadwal Persidangan dan RPH sebagai prioritas utama kegiatan kelembagaan MK dibandingkan dengan kegiatan Non Perkara lainnya. Terima kasih.





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

16	Sudah sangat baik, tingkatkan terus untuk menjadi lebih baik.
17	Lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan terhadap publik
18	Terlepas dari pendapat saya tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tetap harus diberikan pembinaan, khususnya peningkatan kompetensi sehingga dapat mandiri dan menjadi bagian dari independensi para hakim atau MK

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai khususnya di lingkungan Kepaniteraan, baik Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, maupun unit pelaksana yang bertugas menangani administrasi yudisial, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal dan maksimal kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan penanganan perkara;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya berkaitan dengan penanganan perkara, demi terciptanya budaya anti korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
3. Meningkatkan koordinasi antara Kepaniteraan dengan Sekretariat Jenderal mengenai penyusunan jadwal kegiatan bagi Hakim Konstitusi, agar adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kegiatan penanganan perkara (sidang atau Rapat Permusyawaratan Hakim) dengan kegiatan yang tidak terkait dengan penanganan perkara;





LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Waktu Isi
Responden 1	Laki-Laki	16 - 25 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	18-05-2023
Responden 2	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	18-05-2023
Responden 3	Perempuan	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 4	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 5	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 6	Perempuan	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 7	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 8	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 9	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 10	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 11	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	21-05-2023
Responden 12	Perempuan	56 - 65 th	S-1	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 13	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 14	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	21-05-2023





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

Responden 15	Perempuan	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 16	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 17	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri	21-05-2023
Responden 18	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 19	Laki-Laki	> 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 20	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 21	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 22	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 23	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023

**** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.**

B. Capture Aplikasi Survei

Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi. Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara kesetruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 895-3362-29033

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Anti Korupsi

IKUT SURVEI





L A P O R A N
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
KEPANITERAAN

C. Link Akses Hasil Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spak.surveiku.com/validasi-sertifikat/8dfe2f8a-06cc-4347-b405-a64f6312071e>

